

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengedepankan asas otonomi daerah, dimana dalam pembagian kewenangan dan pembangunan suatu daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang sekarang ini berkembang pesat ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga memudahkan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok desa. Berbagai potensi dari suatu desa dapat dikembangkan, baik dari sisi kebudayaan maupun dalam meningkatkan perekonomian desa. Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bukan lagi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam upaya pembangunan desa, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah langkah kongkrit pembangunan desa. Dibentuknya Undang-Undang ini memiliki salah satu tujuan yaitu untuk memaksimalkan peran dan fungsi kepala desa. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan otonomi desa serta mendorong kemandirian desa (Herlina dkk., 2017:112). Pembangunan desa dilaksanakan oleh seluruh elemen dalam masyarakat dengan mengedepankan kerjasama dan semangat gotong royong untuk bersama-sama membangun desa. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat, potensi, kekayaan desa dan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya.

Desa merupakan satuan pemerintahan yang terkecil dalam sistem pemerintahan, menjadikan keberhasilan dari suatu pelaksanaan pembangunan bergantung pada partisipasi masyarakat pada berbagai program kegiatan di desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa baik dari segi pelayanan maupun pada pembangunan desa. Sebagai pemimpin, seorang kepala desa menjalankan tugas untuk memimpin dan menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan tidak ketinggalan dalam pelaksanaan pembangunan desa (Abdul Rozaq, 2005:265). Peranan penting dibawa oleh kepala desa dalam menjalankan dan mengimplementasikan strategi yang telah disusun. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian untuk menggerakkan, mengarahkan serta membina segala potensi agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kepala Desa bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa. Peran dan kedudukan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting dan menempatkan kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan. Keberjalanan pembangunan desa juga dapat dilihat berdasarkan tugas dan fungsi kepala desa apakah dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan tupoksinya sebagai pemimpin di tingkat desa. Dapat dilihat dalam hal ini bahwa kepala desa mempunyai hak atas keputusan dan kesepakatan penting dalam desa, mengarahkan dan mengayomi masyarakat serta menampung segala aspirasi masyarakatnya sehingga masyarakat ikut serta dalam pembangunan itu sendiri (Ryan Permana, 2014:199).

Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi sebuah faktor yang sangat penting sekaligus memegang peranan untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Pemimpin dapat dikatakan berhasil apabila dapat mengarahkan dan membawa mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemilihan bagaimana cara menjalankan kepemimpinan dengan motivasi yang tepat untuk mencapai tujuan dapat memandu pencapaian tujuan pembangunan desa (Ece Febriyanti dkk., 2019:17). Kepemimpinan kepala desa memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa sekaligus dalam mencapai tujuan. Dapat dipahami bahwa dalam tercapainya tujuan sebuah organisasi pada umumnya tergantung pada peranan kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin.

Kepala desa merupakan orang yang terpilih melalui Pilkades yang dilaksanakan sesuai asas demokrasi, kepala desa juga memiliki strategi agar terpilih didalam kepemimpinannya. Keterlibatan masyarakat langsung dalam pelaksanaannya menambah nilai demokratisasi Pilkades. Seorang kepala desa terpilih mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan tugas untuk memimpin didalam suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Secara sistematis berbagai tugas dan kewenangan kepala desa telah hadir sebagai sebuah tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, kepala desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta mengurus kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang dipimpinnya. Paling utama, seorang kepala desa bertanggungjawab atas kemajuan dan kemadirian desa (K.H.A Widjaya, 2011:19). Dengan demikian kepala desa dituntut mampu meletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Keberhasilan dari pembangunan suatu desa tidak terlepas dari keaktifan dan peran serta dari seorang kepala desa. Kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang kepala desa mencerminkan bagaimana pola kepemimpinan yang diterapkan selama ini. Keinginan seorang pemimpin dapat pula dimaknai sebagai sarana pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya tergantung kepada keterampilan serta kemampuan dari seorang pemimpin (Edy Sutrisno, 2009:213). Kepala Desa sebagai seorang kepala wilayah desa memiliki sebuah tanggungjawab dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut membawa sebuah harapan besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kesejahteraan yang didapat dari pembangunan.

Secara etimologi, kepemimpinan merupakan kepribadian atau kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan membujuk pihak lain dalam mengambil tindakan untuk mencapai tujuan bersama dan menjadikan pihak-pihak terkait menjadi struktur awal dari proses kelompok (Kartini Kartono, 2017:38). Seperti yang kita ketahui bahwa kepemimpinan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai sebuah tujuan, pemimpinlah yang mengatur dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan pada intinya merupakan usaha untuk memimpin, menggerakkan, mengarahkan, membimbing serta mempengaruhi untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Dapat diketahui peran penting dimiliki oleh seorang pemimpin guna mencapai tujuan. Kepala Desa harus mampu memanfaatkan segala potensi serta memberdayakan untuk tercapainya tujuan pembangunan desa.

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai badan pemerintahan tertinggi di desa, seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa (Hanif Nurcholis, 2011:67). Berhasil atau tidaknya suatu rencana pembangunan desa dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Pembangunan pedesaan dianggap sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa, dimana pembangunan desa yang terarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja kepala desa dapat dilihat dari sejauh mana kepala desa membimbing masyarakat untuk membantu merencanakan, mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat untuk pembangunan desa. Rencana pembangunan diharapkan dapat membantu masyarakat berkembang lebih baik, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Desa Kemambang merupakan desa yang berada di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dengan luas secara keseluruhan sebesar 393,935 Ha. Desa Kemambang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Bakalan, Dusun Sodong, Dusun Plalar, Dusun Jeporo, Dusun Puwono dan Dusun Kemambang. Desa Kemambang memiliki potensi unggulan utamanya pada industri rumah tangganya, potensi unggulan lain yang dimiliki yaitu pada sektor pertanian dan perkebunan serta bidang pariwisatanya. Berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Kemambang menjadikan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani dengan memanfaatkan kekayaan dan potensi alam setempat. Kehidupan adat istiadat masyarakat Desa Kemambang masih kental dan dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat.

Sebagai desa yang letaknya jauh dari perkotaan, Desa Kemambang mampu menonjolkan namanya dari segala potensi maupun prestasi. Seperti dikutip dari (<https://ungarannews.com/2019/12/21/bupati-puji-kota-ungaran-desa-kemambang-juara-i-tingkat-kabupaten>) Desa Kemambang meraih juara 1 lomba desa tingkat Kabupaten Semarang pada tahun 2019. Lomba desa tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan melihat 3 bidang penilaian lomba desa yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan serta bidang pembangunan. Desa Kemambang pada tahun yang sama juga mendapatkan juara pertama pada lomba PKK Tingkat Kabupaten Semarang. Posisi pertama yang diduduki Desa Kemambang menunjukkan bahwa Desa Kemambang dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain. Kemajuan Desa Kemambang dalam beberapa bidang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian Desa Kemambang. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa serta gotong royong dari seluruh elemen masyarakat.

Selain itu pada periode pertama Heru Susanto pencapaian keberhasilan Desa Kemambang telah terlihat dari beberapa prestasi yang telah diperoleh oleh Desa Kemambang. Pada tahun 2014 Desa Kemambang meraih juara tiga dalam pelaksanaan lomba dalam rangka HUT RI ke-69 yang meliputi penilaian perangkat desa, BPD dan Linmas Desa Kemambang. Heru Susanto memperhatikan segala aspek dan lembaga-lembaga di desa serta memberdayakannya. Juara dua lomba kelompok tani Kabupaten Semarang pada tahun 2018 juga menjadi salah satu keberhasilan Kepala Desa Kemambang membawa nama desa melalui berbagai potensi sekaligus memberdayakan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan Heru Susanto sebagai kepala desa di Desa Kemambang yang berhasil membangun desa. Heru Susanto sebagai kepala desa sejauh ini telah membawa perubahan dan pembangunan di Desa Kemambang mulai dari pembangunan jalan, sarana prasarana dan segala kegiatan pembangunan lain yang terus melakukan pembenahan. Dahulu akses mobilitas masyarakat sangat sulit mengingat medan Desa Kemambang yang sangat curam dan jalan-jalan yang rusak, setelah kepemimpinan Heru Susanto akses mobilitas masyarakat semakin mudah dengan dibangunnya akses jalan bahkan sampai ke gang-gang melalui pembangunan jalan rabat beton.

Sarana prasarana dan fasilitas di Desa Kemambang yang semakin memadai menjadi salah satu alasan keberhasilan Kepala Desa Kemambang dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas yang ada. Sarana pemerintahan yang meliputi kantor desa, sarana ibadah, sarana Kesehatan dan sarana umum lainnya di Desa Kemambang sekarang semakin menyediakan berbagai kebutuhan dalam masyarakat. Selain itu kepemimpinan Kepala Desa Kemambang sangat di percaya oleh masyarakat dengan terpilihnya kembali Heru Susanto sebagai Kepala Desa Kemambang untuk periode yang kedua. Terpilihnya untuk periode yang kedua menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kemambang mempercayai kepemimpinan Heru Susanto. Dengan demikian kepemimpinan seorang kepala desa menjadi hal yang menarik diteliti karena jika pembangunan suatu desa berhasil maka hal tersebut mendorong kemajuan-kemajuan lain dalam sebuah sistem pemerintahan.

Heru Susanto telah menjabat sebagai Kepala Desa Kemambang selama 2 periode, yaitu tahun 2013-2019 untuk periode pertama dan tahun 2019-2025 untuk periode kedua. Heru Susanto resmi menjabat sebagai Kepala Desa Kemambang periode pertamanya pada tahun 2013, dimana pelaksanaannya merupakan kali pertama Pilkades dilakukan secara demokratis di Desa Kemambang. Periode selanjutnya pada tahun 2019, Heru Susanto melangkah maju kembali sebagai calon Kepala Desa dan menjadi salah satu dari dua calon Kepala Desa yang maju dalam pelaksanaan Pilkades. Pada pemilihan pertamanya Heru Susanto memenangkan Pilkades dengan selisih total suara diatas 30 persen. Sedangkan untuk pemilihan keduanya yang sekaligus bertepatan dengan Pilkades serentak di Kabupaten Semarang dimenangkan kembali oleh Heru Susanto dengan suara mutlak diatas 40 persen.

Kemenangan Heru Susanto dalam Pilkades merupakan hasil dari kesetiaan dan rasa kepercayaan masyarakat Desa Kemambang terhadap kepemimpinan Heru Susanto di tahun-tahun sebelumnya. Terpilihnya kembali Heru Susanto sebagai Kepala Desa menandakan bahwa selain memegang peranan penting sebagai sebuah kepala pemerintahan di tingkat desa, masyarakat Desa Kemambang memiliki rasa loyal kepada pemimpinnya melalui kepatuhan dan kesadaran oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui kepemimpinan Heru Susanto sebagai Kepala Desa Kemambang dan hasil pembangunan dari kepemimpinan Heru Susanto dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kemambang. Dalam keberjalanan kepemimpinan Heru Susanto sebagai kepala desa membuahkan hasil dari sinergi antar *stakeholder* dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kepemimpinan Heru Susanto dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai kepala desa ditinjau dari teori kepemimpinan. Kemajuan serta keberhasilan perkembangan pembangunan suatu desa dapat ditentukan dari proses kepemimpinan seorang kepala desa. Tentu menarik untuk melihat lebih jauh kepemimpinan Kepala Desa Heru Susanto selama masa jabatannya sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilannya dalam pembangunan desa. Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah kepemimpinannya sesuai dengan tugas dan fungsi kepala desa menurut Undang-Undang Desa. Mengingat kondisi dan latar belakang di atas, kajian yang lebih mendalam terhadap fenomena ini mengambil judul penelitian. “Kepemimpinan Kepala Desa Heru Susanto dalam Pembangunan Desa di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan Heru Susanto sebagai Kepala Desa dalam pembangunan desa ?
2. Apa saja hasil pembangunan desa dari kepemimpinan Heru Susanto sebagai Kepala Desa ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa Kemambang Heru Susanto dalam pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui hasil pembangunan desa dari kepemimpinan Kepala Desa Kemambang Heru Susanto.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, referensi dan wawasan studi model kepemimpinan, khususnya objek studi kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk dunia ilmu pengetahuan dalam mengetahui model kepemimpinan seorang kepala desa. Selain itu penelitian ini dapat menambah kajian yang berkaitan dengan ilmu politik dan pemerintahan tentang desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya untuk dijadikan sumber rujukan dalam memperdalam pengetahuan mengenai kepemimpinan kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan untuk ruang lingkup lebih luas. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam penggunaan kepemimpinan utamanya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam menjamin keaslian suatu penelitian, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian yang dilakukan terdahulu dengan penelitian yang dilakukan pada masa sekarang. Perbandingan tersebut berupa judul, peneliti, tahun, tujuan, lokasi, metode, dan hasil penelitian. Penelitian yang telah ada sebelumnya diperlukan sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk mendukung penelitian saat ini. Terdapat beberapa perbandingan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang mulai dari tujuan dan fokus yang diambil oleh masing-masing penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dengan judul “ Gaya Kepemimpinan Kepala Desa“ pada studi Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Krangkuten, Kec Gondang, Kab Mojokerto yang ditulis oleh Roudlotus Tsaniyah, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti kepemimpinan kepala desa. Hasil temuan dari penelitian ini ada pada gaya kepemimpinan kepala desa di Desa Karangtuten, Kec Gondang, Kab Mojokerto yaitu menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Pada pelaksanaan pengambilan keputusan, kepala desa enggan mengambil keputusan secara sepihak melainkan dilakukan bersama warganya maupun bersama pihak-pihak yang terkait. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah pada lokasi penelitian dan fokus yang akan diambil oleh penulis, dimana penelitian terdahulu membahas peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sedangkan yang ingin penulis ambil adalah gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membangun Desa (Studi kasus di Desa Banyurasa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Periode 2007 – 2018)”. Penelitian ini ditulis oleh Imam Bayu Saktiaji, FISIP, Universitas Siliwangi pada tahun 2019. Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut memberikan wawasan bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat menyampaikan kemajuan terhadap Desa Bayurasa berkat kiprah kepemimpinan kepala desa. Dari penelitian ini dalam pelaksanaan membangun desa tidak luput dari gaya kepemimpinan kepala desa. Terdapat perbedaan dari penelitian yang terdahulu yaitu pada tempat penelitian dan fokus yang diambil penulis. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengenai tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa dalam memimpin pemerintahan desa kaitannya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Penelitian terdahulu yang ketiga sebagai perbandingan dengan judul. “Gaya Kepemimpinan Kepala-Kepala Desa (Studi Kasus Kepala Desa Di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol).” yang ditulis oleh Maisar R. Daud, FIS, Universitas Gorontalo pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui beberapa gaya kepemimpinan kepala desa dan cara penerapan gaya kepemimpinan kepala desa tersebut dalam sebuah wilayah kecamatan yaitu di Kec Gadung, Kabupaten Buol. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada studi kasus yang dilakukan, penelitian terdahulu mengedepankan studi kasus beberapa kepala desa di sebuah kecamatan. Sedangkan persamaannya yaitu ada pada ingin mengetahui cara penerapan kepemimpinan kepala desa.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kepemimpinan

Terdapat berbagai definisi tentang kepemimpinan yang bervariasi sebagaimana orang-orang berusaha mendefinisikan konsep kepemimpinan. Kepemimpinan secara garis besar mencakup proses mempengaruhi untuk mencapai tujuan organisasi, mendorong dan memotivasi pengikutnya, serta mempengaruhi proses peningkatan kelompok dan budayanya (Chris Harijanto, 2007:3). Pemimpin merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendaknya. Kepemimpinan merupakan elemen penting dalam suatu organisasi karena menyangkut hubungan antara pemimpin dan anggota tim dimana dalam hal ini masyarakat.

Bagian integral dari kepemimpinan adalah proses mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mau atau tidak mau melakukan apa yang mereka inginkan (Kartini Kartono, 2002:5). Kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan manajemen memegang peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Berbagai teori kepemimpinan yang tengah berkembang sekarang berusaha untuk mengetahui bagaimana efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin hadir dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, diketahui bahwa kepemimpinan dapat dilihat dari karakter pemimpin, perilaku kepemimpinan, budaya organisasi, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, dan hubungan antara pemimpin dengan tanggung jawabnya. Demikian teori kepemimpinan ingin mengetahui bagaimana memimpin melalui karakter, perilaku dan sifatnya.

(Gary Yukl, 2010:6) mendefinisikan kepemimpinan mempengaruhi proses di mana orang memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan secara efektif, dan proses yang memfasilitasi pencapaian tujuan bersama baik secara individu dan kolektif. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kepemimpinan beserta dengan sifatnya. Kepemimpinan yang muncul berasal dari apa yang dilakukan seseorang dan bagaimana seseorang memperoleh dukungan dari pengikut atau orang yang dipimpin. Kepemimpinan sebagai suatu proses, berlaku untuk individu dalam peran yang ditugaskan dan muncul.

Berkaitan dengan kepemimpinan terdapat berbagai pendekatan salah satunya adalah pendekatan sifat. Pendekatan sifat berakar pada teori kepemimpinan yang mengemukakan hal itu orang-orang tertentu dilahirkan dengan sifat-sifat khusus yang menjadikan mereka pemimpin yang hebat. Pemimpin yang mengambil pendekatan ini, prinsip-prinsip keteladanan sangat ditekankan. Keteladanan tersebut berupa sifat dan perilaku yang harus dimiliki seorang pemimpin agar pengikutnya merasakan dan mengikuti sifat dan perilaku tersebut. Diyakini bahwa pemimpin dan bukan pemimpin dapat dibedakan oleh seperangkat sifat universal. Pendekatan ini menekankan kualitas pemimpin yang keberhasilannya terletak pada kekuatan luar biasa dari seorang pemimpin. Dengan demikian teori ini lebih menekankan pada fungsi-fungsi kepemimpinan dimana hal ini terlihat dari cara atau sikap saat pengambilan keputusan, cara berkomunikasi dan melimpahkan wewenang atau tugas. Keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin semuanya tergantung pada sikap dan perilaku yang dimiliki.

Pendekatan sifat menekankan pentingnya perilaku pemimpin yang dapat diamati dari karakteristik pribadinya atau sumber otoritasnya. Oleh karena itu, pendekatan ini mengacu pada sifat dan otoritas pribadi. Metode sifat mencoba menjelaskan kualitas yang membuat seseorang sukses dimana pada pendekatan ini terdapat penyimpangan dari asumsi bahwa pusat kepemimpinan ada pada individu.

Dikatakan pada teori perilaku bahwa pemimpin hebat itu bukan dilahirkan melainkan dibuat. Pada teori kepemimpinan ini memiliki fokus pada seorang pemimpin dengan perilakunya daripada karakteristik pemimpin maupun kualitas bawaan. Seorang pemimpin dapat dilatih dan dapat belajar menjadi pemimpin hebat melalui pengalaman, pengamatan serta pengajaran yang baik menurut teori ini. Teori tersebut berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan kombinasi dari tiga keterampilan utama yaitu ada pada keterampilan konseptual, interpersonal dan kemampuan teknis. Pendekatan perilaku adalah pendekatan yang didasarkan pada gagasan bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin tergantung pada kemampuan dan gaya kepemimpinan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi bagaimana cara memberi perintah, cara berkomunikasi, memberikan perintah maupun wewenang ataupun cara mendorong semangat kerja bawahannya.

Dengan demikian, pendekatan perilaku mengacu pada sifat dan otoritas pribadi, dan pendekatan situasional dan pendekatan perilaku memiliki kesamaan dimana keduanya menekankan perilaku kepemimpinan dapat digunakan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, kepemimpinan bukanlah kualitas pribadi melainkan fungsi situasional, yaitu kualitas yang muncul dari interaksi orang-orang dalam

situasi tertentu. Metode situasional disebut metode darurat, metode ini didasarkan pada omongan bahwa pada suatu organisasi keberhasilan kepemimpinan bukan hanya ditentukan dari karakteristik dan perilaku seorang pemimpin saja, tetapi juga dipengaruhi olehnya. Pendekatan situasional atau kontingensi adalah sebuah teori yang mencoba untuk menemukan jalan tengah antara sudut pandang dimana ada prinsip-prinsip pengorganisasian dan manajemen universal yang memiliki situasi yang berbeda dan oleh karena itu harus menghadapi gaya kepemimpinan.

Situasi dari pendekatan situasi ditentukan oleh kematangan pemikiran yang terdiri dari dua dimensi yaitu berdasarkan kematangan profesional dan berdasarkan kematangan psikologis. Pendekatan situasional tidak hanya merupakan komplikasi penting dari kepemimpinan, tetapi juga membantu calon pemimpin dengan konsep tertentu yang berguna mengevaluasi berbagai situasi dan menunjukkan perilaku kepemimpinan yang sesuai berdasarkan situasi tersebut. Peran seorang pemimpin harus diperhatikan berdasarkan kinerjanya dari adanya pendekatan situasional.

1.6.2 Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala desa atau nama lainnya dibantu oleh perangkat desa sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari urusan penyelenggaraan pemerintah desa. Sebagai kepala pemerintahan, kepala desa bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa berperan sebagai wakil masyarakat desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa. Selain melaksanakan kegiatan, koordinasi, fungsi dan perannya, kepala desa memiliki sebuah tanggung jawab dalam berbagai aspek pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa.

Kepala desa harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam segala bidang dan bentuk kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala desa memiliki beberapa tugas dimana kepala desa perlu memotivasi masyarakat dalam segala bidang dan bentuk kegiatan, kepala desa perlu mensosialisasikan berbagai program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing masyarakat, dan disini kepala desa harus mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan di desa.

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa memiliki kewajiban dan tugas sebagai kepala pemerintahan atas terselenggaranya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, menyelenggarakan pembinaan masyarakat dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 seorang kepala desa berwenang :

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa.
- b. Memberhentikan dan mengangkat perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pembendaharaan desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Memajukan kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan keterlibatkan masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perekonomian yang produktif.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.

- j. Menerima dan mengusulkan pemberian sebagai aset negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa..
- k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif .
- n. Menurut undang-undang, desa diwakili di dalam dan diluar pengadilan atau oleh perwakilan hukum.
- o. Menjalankan berbagai kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan ayat 1 sebagaimana yang dimaksud pada alinea pertama. bahwa kepala desa memiliki hak untuk memberikan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban lain kepada perangkat desa. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut sebagaimana tertulis pada ayat 1. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip politik dan pemerintahan desa yang bertanggung jawab, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, mengedepankan profesionalisme, bersih serta menghilangkan segala praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu kepala desa juga berkewajiban untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kebijakan dan kepentingan di desa. Jika dikaitkan dengan kepemimpinan kepala desa, bagaimanapun kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin selalu bertindak demokratis dan selalu memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program kegiatan dimana hal hal tersebut menjadi salah satu dasar dari keberhasilan kepala desa.

Dalam pembangunan desa, kepala desa dapat berperan sebagai fasilitator, motivator maupun membimbing masyarakatnya dan perangkat desa lainnya guna mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa, kepala desa juga merupakan salah satu pendorong keberhasilan tersebut. Peran kepala desa dibutuhkan masyarakat dimana peran yang dibawa yaitu sebagai penggerak dalam memajukan pembangunan desa dengan memotivasi masyarakat dalam berbagai bentuk salah satunya berupa himbauan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk rencana pembangunan desa untuk kemajuan desa itu sendiri. Dalam mendorong masyarakat, kepala desa memberikan motivasi, memberikan semangat penuh kepada masyarakat, pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain agar orang tersebut melakukan dan menuruti dari motivasi yang telah diberikan sebelumnya secara rasional dan penuh tanggung jawab.

Kepala Desa mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan desa, dimana perannya memotivasi masyarakat agar turut ikut serta baik berupa himbauan, dorongan semangat maupun bentuk motivasi lain. Dalam hal ini desa sebagai penanggung jawab pemerintahan dan berperan sebagai penggerak kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan mendorong warga untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan desa. Selain sebagai motivator, kepala desa dapat berperan sebagai fasilitator atau orang yang memberikan bantuan untuk memperlancar proses komunikasi sekelompok orang agar dapat memahami atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Dengan demikian, kepala desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan umum masyarakatnya.

Fasilitator dapat dikatakan sebagai wadah pelaksanaan rencana program atau hal-hal yang mendesak terjadi di desa, seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan desa. Disisi lain kepala desa dapat berperan sebagai mobilisator atau seseorang yang mengambil tindakan atau mengarahkan untuk terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang memberikan kebermanfaatan bersama. Kepala Desa berperan sebagai pengawas pembangunan, penggerak pelaksanaan program kegiatan dan pelopor pembangunan desa, maka dari itu kepala desa dituntut untuk melakukan pendekatan, pembinaan dan pengembangan masyarakat secara swadaya dan gotong royong untuk mewujudkan pembangunan dan pelaksanaan rencana tersebut. Dapat dimaknai bahwa, kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa merupakan penanggung jawab dan penyelenggara seluruh bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat juga masih menjadi tanggungjawab kepala desa dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 14 dan pasal 15 telah mengatur bahwa tugas seorang kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa melakukan penetapan peraturan di desa, pembinaan terkait masalah pertanahan, melaksanakan pengelolaan kependudukan, dan meningkatkan keamanan dan ketentraman di desa. Pelaksanaan pembangunan yang dibahas dalam pemberdayaan masyarakat meliputi penyediaan fasilitas umum di desa serta pemenuhan sarana prasarana desa dan pembangunan jalan desa dan jembatan desa sebagai sarana mobilitas masyarakat serta sarana pembangunan lain.

1.6.3 Model Kepemimpinan

Kepemimpinan berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan berhubungan erat dengan organisasi (Soetopo, Hendyat. 2010:4). Kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Maka dari itu terdapat beberapa model kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi tersebut diantaranya :

1.6.3.1 Kepemimpinan Kharismatik

Pada dasarnya pemimpin dengan model kepemimpinan kharismatik merupakan kepemimpinan yang mengedepankan efek atau kemampuan kharismatik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin tersebut memiliki kekuatan untuk menarik banyak simpati dan kepercayaan dari masyarakat yang dipimpinnya.

Kemampuan karismatik untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain dalam bentuk ciri-ciri kepribadian yang diistimewakan atau berlebihan membuat pengikut bersedia melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik ini adalah bahwa ia melibatkan orang-orang dan mereka dapat mengangkat semangat mereka dengan cara mereka berbicara. Sebagai seorang pemimpin mereka merupakan pemimpin yang visioner, berorientasi pada pembicaraan, berani mengambil risiko, dan komunikator yang baik. Pemimpin ini biasanya sangat karismatik atau memiliki kharisma, memiliki daya tarik, berwibawa, dan tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai pemimpin.

1.6.3.2 Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional merupakan model kepemimpinan dimana para pemimpin menyatukan dan mendorong pengikut pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memperjelas peran dan persyaratan misi. Pemimpin menentukan apa yang harus dilakukan bawahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tipe kepemimpinan ini menekankan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh bawahan dan lebih menitik beratkan pada perannya sebagai atasan dimana pada tipe kepemimpinan ini terlihat beberapa aspek seperti aspek fisik, aspek proseduralisme dan lainnya. Dikenal sebagai kepemimpinan manajerial dimana memiliki fokus pada peran mengawasi, kinerja tim dan organisasi dalam kepemimpinan transaksional.

Pada kepemimpinan transaksional pemimpin mengajak para pengikutnya untuk mematuhi terhadap 2 faktor dari model kepemimpinan ini yaitu penghargaan dan hukuman. Pemimpin mengartikulasikan bagaimana kebutuhan pengikut akan dipenuhi sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam teori ini, seorang pemimpin memotivasi bawahannya dengan menetapkan tujuan, menjelaskan peran dan persyaratan tugas, serta memberikan penghargaan dan hukuman yang sesuai. Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang kebersamai dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menghargai produktivitas mereka. Para pemimpin dengan model kepemimpinan ini bekerja dengan cara memperhatikan kinerja. Pendekatan pada kepemimpinan ini konsep yang digunakan yaitu pencapaian tujuan sebagai sebuah kerangka kerja.

1.6.3.3 Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan dimana pemimpin berusaha untuk mengubah bawahannya agar mengejar tujuan-tujuan organisasi daripada mengejar tujuan-tujuan pribadi. Pemimpin model ini mempunyai visi dan tujuan yang jelas, terdapat gambaran jelas pada organisasi di masa mendatang ketika seluruh sasaran dan tujuan telah tercapai. Jenis kepemimpinan ini memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan semula. Seorang pemimpin transformasional adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan dalam anggota tim mereka dan seluruh organisasi. Pemimpin transformasional berusaha untuk memungkinkan setiap individu dan tim untuk bekerja melampaui target dan merupakan pemimpin yang visioner untuk masa depan dengan mengubah budaya dan nilai-nilai organisasi dengan visi baru. (Dolet, Unaradjan. 2003:67).

Kepemimpinan transformasional dapat digunakan secara dramatis meningkatkan kinerja seseorang ketika pemimpin membutuhkannya. Kepemimpinan transformasional bisa menjadi model kepemimpinan yang melelahkan. Pemimpin bertanggung jawab atas visi dan sarana untuk mencapai visi dimana pemimpin transformasional mempertaruhkan visinya pada visi yang benar. Visi seorang pemimpin memberdayakan pengikutnya untuk bekerja dengan pemberian imbalan. Dalam mencapai visi yang diharapkan pemimpin transformasional membuat sebuah perubahan penting dalam organisasi yakni tentang visi, cara berorganisasi dan sumberdaya manusia.

1.6.3.4 Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis adalah jenis kepemimpinan yang berfokus pada upaya untuk menciptakan sinergi dari keragaman potensi manusia yang dihasilkan atau dihasilkan oleh anggota. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin bertanggung jawab guna mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan luar organisasi dengan strategi dan implementasi organisasi melalui visi misi. Kepemimpinan strategis merancang penggunaan proses strategi sebagai metode pengambilan keputusan sistematis yang mengintegrasikan kepemimpinan timbal balik ke dalam konsep dan praktiknya. Kepemimpinan strategis termasuk membawa arah yang strategis, memperdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia, mempertahankan budaya organisasi agar berjalan efektif, mempertahankan keahlian tim, menekankan dan menetapkan praktik.

Strategi bukan hanya alat manajemen yang digunakan oleh para pemimpin yang memegang posisi otoritas tetapi juga merupakan metode kepemimpinan interaktif yang menjelaskan tujuan dan prioritas, memobilisasi motivasi dan sumber daya, dan menetapkan arah untuk masa depan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan elemen yang sangat strategis dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin adalah seorang individu, dan kepemimpinan adalah kualitasnya sebagai seorang pemimpin (Djokosantoso Moeljono, 2012:40). Kepemimpinan strategis mencakup kemampuan untuk bersikap natural, mampu mengantisipasi serta memberdayakan orang lain untuk mewujudkan perubahan strategis. Pekerjaan multifungsi yang melibatkan bekerja dengan orang lain memperhitungkan tidak hanya sub-unit, tetapi seluruh perusahaan.

1.6.4 Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 81 pada ayat 1 pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam desa. Pada pasal 4 disebutkan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Pelaksanaan ini pun tentunya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) yang merupakan dokumen untuk arah pembangunan desa, akan dilaksanakan dan direalisasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) setiap 1 tahun.

Menurut Sutoro Eko (2005:23) pembangunan desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan di bina terus menerus, sistematis dan terarah serta sebagai bagian penting dalam usaha yang menyeluruh. Pelaksanaan agenda kegiatan dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, Adapun tujuan jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan dan kehidupan rakyat yang lebih kuat dan nyata dalam pembangunan-pembangunan berikutnya. Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu guna mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun beberapa paradigma baru pembangunan desa yaitu pertumbuhan yang berkualitas, proses keterlibatan warga yang marginal dalam pengambilan keputusan, menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dan lain-lain, negara membuat lingkungan yang memungkinkan, pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial, penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal pengembangan teknologi secara partisipatoris, penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin, pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat, organisasi belajar non-hirarkis, dan yang terakhir peran negara yaitu menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi masyarakat. Dengan adanya pembahasan tersebut bahwa pembangunan dimulai dengan keikutsertaan masyarakat yang sangat penting baik pembangunan fisik maupun non-fisik memerlukan perencanaan yang tertuang di dalam dokumen desa yaitu RPJM Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya adalah pembangunan sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan yang ada di desa khususnya dalam pembangunan fisik dan non fisik di desa. Terdapat didalam permendagri 114 tahun 2015 konteks perencanaan pembangunan desa menjadi 4 (empat) bidang yang terdapat dalam pasal 6 yaitu sebagai berikut.

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa.
 - b. Pendapatan desa.

- c. Penyusunan tata ruang desa.
- d. Penyelenggaraan musyawarah desa.
- e. Pengelolaan informasi desa.
- f. Penyelenggaraan perencanaan desa.
- g. Penyelenggaran evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
- h. Penyelenggaraan kerjasama desa.
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa,

- a. Tambatan perahu.
- b. Jalan pemukiman.
- c. Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- d. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
- e. Lingkungan pemukiman masyarakat desa, dan
- f. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana, perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat, melainkan juga pada peranan dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembangunan, yaitu negara dan masyarakat. Pemerataan pembangunan bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia dikarenakan oleh salah satu faktor kondisi geografis Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau, dengan ini pembangunan akan terlaksana apabila disetiap lapisan masyarakat ikut serta dalam pemerataan pembangunan di setiap provinsi, kabupaten dan juga tingkat desa.

Dalam kaitannya pembangunan pada umumnya dan pembangunan desa khususnya maka penerapan perencanaan di bidang pembangunan desa memegang peranan penting, karenanya dengan perencanaan yang terarah akan menjamin adanya sistematika urutan kegiatan. Pembangunan akan lebih berkembang dan berjalan dengan adanya kesiapan yang matang dari mulai awal hingga akhir, adapun pengelolaannya adalah sebagai berikut yaitu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Perencanaan

Menurut Yansen TP (2014: 111), fungsi yang dilakukan mulai dari tahap identifikasi masalah untuk memastikan masalah pembangunan yang perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan, ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama tahap persiapan untuk menyusun rencana, baik menyangkut substansi yang direncanakan maupun dukungan berbagai sumber daya yang diperlukan dalam persiapan tersebut menghasilkan kelayakan sebuah rencana. Selanjutnya yaitu tahap menilai kelayakan usulan yang telah dibuat, menyangkut kelayakan rencana untuk ditindaklanjuti, kelayakan pendanaan, kelayakan personel yang terlibat dalam proses perencanaan, sehingga penjadwalan waktu perencanaan itu di mulai, dilaksanakan, hingga dievaluasi.

2. Pelaksanaan

Pembangunan Desa dilaksanakan apabila disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dengan tetap melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal,

meskipun dalam hal pelaksanaan pasti akan memiliki kendala yang mungkin terjadi, pada tingkat musyawarah desa (musdes) kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut, kemudian diikutsertakan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan. Bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam tahap perencanaan adalah kehadiran dalam rapat serta keaktifan dalam member saran atau usulan.

3. Pemantauan dan Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 82 pada ayat 1 masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dimana masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Pada pasal 5 disebutkan bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan pembangunan desa dimaksudkan untuk sesuai dengan perencanaan yang telah menjadi acuan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Dalam perencanaan telah ditentukan gambar beserta rencana anggaran pembangunan.

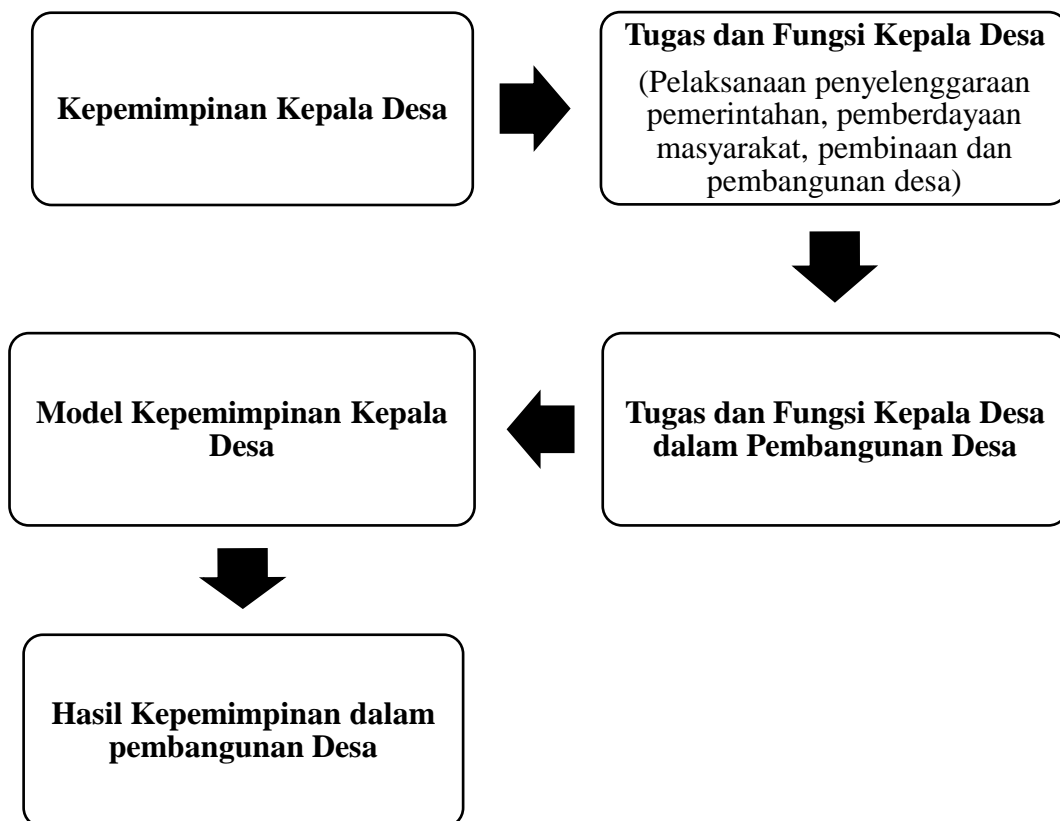
1.7 Definisi Konsep

1. Kepemimpinan adalah cara dimana seorang pemimpin memberikan pengaruh pengikutnya melalui karakteristik tertentu, memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan merupakan dasar organisasi dan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya.
2. Kepemimpinan Kepala Desa memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dan menentukan tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Kepala Desa mempunyai wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Selain itu, kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat desa, pemerintah desa harus menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi atau sumber daya dalam lingkungannya.

1.8 Kerangka Berpikir

Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin pada tingkat desa yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pembangunan desa. Dalam pembangunan desa, kepala desa dapat berperan sebagai fasilitator, motivator atau membimbing masyarakatnya guna mencapai tujuan pembangunan desanya. Keberhasilan dari pembanguan suatu desa tidak terlepas dari keaktifan dan peran serta dari seorang kepala desa.

Sebagai pemimpin desa, kepala desa memegang peranan penting dalam berbagai bidang pembangunan, terlihat dari perilaku kepemimpinan kepala desa dalam memajukan pembangunan masyarakat. Dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya, kepala desa menggunakan model kepemimpinan tertentu agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga keberhasilan dari kepala desa sebagai seorang pemimpin di tingkat desa dapat dilihat dari bagaimana cara beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Model kepemimpinan tertentu membawa hasil dari sebuah kepemimpinan dimana sebagai pemimpin akan dijadikan contoh, atau teladan dalam masyarakat terlebih kepala desa merupakan figur pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini dapat dilihat dari bagan dibawah ini :



1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknik tentang metode-metode yang digunakan dengan penelitiannya (Sedermayati dan Syaifudin H, 2002). Hal-hal yang mempengaruhi metode-metode dalam penelitian penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian tidak menghasilkan angka-angka melainkan dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta merupakan penelitian yang menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh dengan rumusan statistik (Lexy J Melong, 2007:6). Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa menggunakan alat penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.9.2 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek diperolehnya sebuah data yang nantinya akan dijadikan sumber utama. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1.9.2.1 Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian secara langsung melalui alat pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai subjek informasi terkait (Syaifudin Azwar, 2005). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer diperoleh dari Kepala Desa

Kemambang tentang model kepemimpinan yang digunakan dalam pembangunan desa. Selain itu juga dilakukan wawancara/interview pada BPD, masyarakat serta perangkat desa untuk memperoleh jawaban bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Heru Susanto.

1.9.2.2 Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Nur Indrianto, 2013). Data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh melalui data dari masyarakat sekitar untuk memperkuat data primer.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1.9.3.1 Observasi

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dimana dalam metode ini peneliti mencatat informasi yang telah disaksikan selama kegiatan penelitian (W. Gulo, 2002). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat dalam kehidupan orang yang diamati. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa.

1.9.3.2 Wawancara

Wawancara adalah data yang dikumpulkan oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan tanggapan responden direkam (Soehartono Irawan, 2005). Metode ini digunakan untuk mewawancarai subjek penelitian secara langsung untuk memperoleh data.

Wawancara dilakukan kepada :

1. Heru Susanto selaku Kepala Desa
2. Dyah Hayyu K Selaku Ketua BPD
3. Ratna Dewi selaku anggota Karangtaruna
4. Arifin selaku Ketua RT 02/ RW 04 Dusun Bakalan
5. Ahmad Rokib selaku Masyarakat Desa Kemambang
6. Nurul Khotimah Selaku Kepala Seksi Pemerintahan

1.9.3.3 Dokumentasi

Penelusuran data yang diperoleh peneliti dalam metode dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, laporan dan surat menyurat (Husaini Usman, 2001). Metode ini digunakan kaitanya dengan melihat kondisi objektif dari subjek penelitian seperti sejarah berdirinya desa, susunan organisasi, keadaan jumlah penduduk, mata pencaharian masyarakat serta keagamaan di Desa Kemambang dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.9.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan : reduksi data, analisis data, dan kesimpulan.

1.9.4.1 Reduksi Data

Mereduksi data memiliki arti dari data yang diperoleh sebelumnya dirangkum dan disesuaikan dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan tema, fokus pada data penting dan pokok yang dibutuhkan dalam penelitian dan membuang data yang sekiranya tidak perlu (Sandu Siyoto dkk, 2015). Pada tahap ini penulis melakukan telaah data secara keseluruhan yang sebelumnya telah dihimpun dari lapangan kaitanya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa.

1.9.4.2 Analisis Data

Setelah dilakukan reduksi data, hasil reduksi data disusun ke dalam bentuk matriks sehingga gambarannya dapat terlihat lebih lengkap. Pada tahap analisis data dilakukan melalui penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun dalam bentuk naratif secara runtut dan baik untuk memudahkan pemahaman. Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang ada.

1.9.4.3 Kesimpulan

Selanjutnya data yang dikumpulkan pada bagaian ini peneliti mengungkapkan kesimpulan berasal dari data yang diperoleh yang nantinya akan menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun tujuan yang ingin diperoleh yaitu untuk mencari korelasi baik berupa persamaan maupun perbedaan. Konklusi atau kesimpulan ditarik dengan menggunakan perbandingan topik penelitian dengan implikasi yang terkandung dalam konsep-konsep yang mendasari dalam penelitian.